

Singaradja, 12 September 1964.-

Belii.-
No: 11/Pan.I/64. Express.-
C. piren: 1 expl.

Atjara: Orti.Keputusan pembukaan
SMP.Negara di Badjra dan
Blahkiuh.-

Kepada jth.

1. Sdr. Pemimpin SMP.Gotong Rojong
di Badjra/Tabanan dan
2. " Pemimpin SMP.WanaJasa di
Blahkiuh (Denpasar).-

Sebagaimana Saudara telah maklum bahwa sekolah
Saudara terhitung mulai 1 Agustus 1964 dioper menjadi
SMP.Negara, maka bersama ini kami kirimkan Surat kepu-
tusan Direktorat Pendidikan Umum tertanggal 30-7-1964
No: 20/S.K/S/III untuk dimaklumi dan seperlunya.

Sebagai pimpinan kami tunduk:

1. SMP.Negara Badjra: Sdr. Hjoman Dedeh guru Negeri ja
SMP.Gotong Rojong Badjra.
2. SMP.Negara Blahkiuh: " Ida Bgs.Kaler guru Negeri :
SMP.WanaJasa Blahkiuh.

Diharap Saudara bersama Pengurus Jajasan setje-
pat mungkin mengadakan persiapan2 seperlunya agar per-
mian segera pula dapat dilakukan.

Untuk bahan pengusulannya diminta agar Sdr.Nj.I
deh dan Ida Bgs.Kaler jdm. mengirimkan kekantor kami
daftar riwayat hidup, salinan idjazah, salinan skp.ter-
akhir dll. masing2 dlm rangkap empat.-

Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.

Disubser jth.
Dr. Gob. Perw. Dep. PDK. Dh. Bali
di Singaradja.-



(Mada Suwara)

No.: 80/S.K/D/III.

Kepada: Sri Jember Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia.

DIJADIKAN, 30 Juli 1964.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

peraturan Menteri Pendidikan tgl. 17 Djuli 1964 atas usul Kepala Direktorat Pendidikan Umum dengan suratnya tgl. 3 Djuli 1964 no. 394/AV/Um/64 tentang perbaikan, penataan dan penegerian S.M.P. tahun pelajaran 1964/1965.

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertadjuan melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat atas, baik umum maupun kejuruan, perlu diwujudkan beberapa buah S.M.P. Negara pada permulaan tahun pelajaran 1964/1965 di beberapa tempat;
- b. bahwa S.M.P. Negara yang telah terlanjur besar sehingga penjurusan dan pengadjarannya tidak dapat lanjut, dipandang perlu diarahkan menjadi dua buah sekolah negara yang masing-masing berdiri sendiri;
- c. bahwa S.M.P.-2 swasta yang telah memenuhi syarat2 minimal sebagai sekolah negara dan yang sesuai dengan rentjana penjurusan sekolah Departemen P.D. dan K. selanjutnya dinominasikan menjadi S.M.P.-2 Negara;
- d. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Yayasan atau Pemerintah Daerah setempat bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya;
- e. bahwa berhubung dengan hal2 tersebut diatas, maka perlu diadakan, ditetapkan dan menegerikan S.M.P. tahun adjaran 1964/1965;

Meningat:

1. Undang-undang Dasar th. 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak warga-negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.32 th.1947 dan an tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjutan negara dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah mengenai penyelenggaraan sekolah negara;
3. Undang-undang art.4 th.1950 jo. Undang-undang no.12 th.1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah;
4. surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djenuari 1952 no.2512/Kab. tentang penetapan nama-nama sekolah rendah dan sekolah landjutan serta singkatannja;
5. Surat keputusan Menteri P.D. dan K. tgl.28 Februari 1963 No.13/1963 tentang perubahan nama "Sekolah Rajat 6 tahun" menjadi "Sekolah Dasar";
6. Surat keputusan Menteri P.P. dan K. tgl. 25 April 1947 No.38880/S.jo 1959 no.125409/S. tentang Peraturan Umum Ujian masuk dan ujian Penghabisan Sekolah Landjutan Negara;
7. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama, selanjutnya disingkat S.M.P. Negara, ditempat seperti tertentum dalam lampiran I keputusan ini;

Kedua

Kedua : memerikan S.M.P. Negara ditempat-tempat seperti tertentum dalam lampiran II keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif, maupun dibidang teknik pendidikan.

Ketiga : mengerikan S.M.P. seperti ditempat-tempat seperti tertentum dalam lampiran III keputusan ini menjadi S.M.P. Negara setempat;

Keempat: Terhadap pasal-pasal "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. a) Selama dan sekedar Pemerintah c.q. Departemen P.D. & K. belum bisa menyediakan, maka gedung, halaman sekolah, meubiler dan alat2 perlatan lainnya didjamin atau ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat.
- b) Segala pinjaman yang bersifat keperdataan termasuk perdjandjian hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungan Panitia Sekolah atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
2. a) perumahan guru2 didjamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan.
- b) sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan2 pemerintah yang berlaku untuk itu.
3. Kepala Sekolah atau guru2 yang diserahi pimpinan ditundjuk oleh Departemen P.D. dan K.
4. Terhadap sekolah2 yang diterangkan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid2 dikenakan ketentuan2 tentang pengadjar, pegawai dan murid2 negara, dengan tjatatan, bagi yang tidak memenuhi syarat, penjelurannya menjadi tanggung-jawab Panitia atau Jajasan atau penganbil inisiatip dari sekolah yang bersangkutan.
5. Khusus murid2 yang diterima dikelas I hanyalah yang lulus ujian masuk S.M.P. Negara dan penempatan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk2 Inspeksi S.M.P. Daerah yang bersangkutan.
6. a) tiap2 kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid.
- b) tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun2 berikutnya harus seizin Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah.

Kelima: Djikalau syarat2 tersebut diatas ini ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penyelenggara sekolah atau Jajasan atau Panitia, maka kironja se-waktu2 Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negara atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid2 dikelas I.

Keenam: biaya penyelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat-keputusan ini, sekedar untuk th. 1964 dibebankan pada pasal 8E. 3. 15 dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Departemen P.D. dan K. tahun 1964 dan untuk tahun2 selanjutnya pada nota anggaran yang selaras dengan itu.

Ketujuh: Surat Keputusan ini berlaku/pada tanggal 1 Agustus 1964.

2 mls

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Ates nama Menteri:

Ates nama Direktur Pendidikan Umum

Ates nama beliau :

Direktorat Tata - Laksana,

J. D A S T I R A N)-



SALINAN surat keputusan ini dikirim untuk :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Luar.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Yogyakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Theasuri Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (D.P.P.N.) di : Banda Atjeh (Atjeh); Medan; Padang; Pekanbaru (Riau); Djambi; Palembang; Djakarta; Bandung; Semarang; Surabaya; Jogjakarta; Bandjarmasin - (Kalimantan Selatan); Palangkaraya (Kalimantan Tengah); Samarinda (Kalimantan Timur); Singaperbangsa (Bali); Denpasar (Bali); Kotaraja - (Nusatenggara Barat); Ambon (Maluku); Makasar; Kendari (Sulawesi Tenggara); Manado; Palu (Sulawesi Tengah).
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
7. Djawatan Cadangan 2 Negara Asiat, Departemen P.U. dan P. Kramat No.13 di Djakarta (5 expl.)
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Perseidjaraan, Bjl.Br.Sutomo No.8 di Djakarta (2expl.)
9. D.P.R. - C.R. "Komisi J" (Seksi Pendidikan) di Djakarta (10 expl.)
10. Walikota di : Banda Atjeh (Atjeh); Bindjai (Sumatra Utara); Bontoli; Palembang; Djakarta; Sukabumi; Gorontalo;
11. Kepala Daerah tingkat I di : Banda Atjeh (Atjeh); Medan; Padang; Pekanbaru (Riau); Djambi; Palembang; Djakarta; Bandung; Semarang; Surabaya; Jogjakarta; Bandjarmasin (Kalimantan Selatan); Palangkaraya (Kalimantan Tengah); Samarinda (Kalimantan Timur); Singaperbangsa (Bali); Denpasar (Bali); Kotaraja (Nusatenggara-Barat); Ambon (Maluku); Makasar; Kendari (Sulawesi-Tenggara); Manado; Palu (Sulawesi Tengah).
12. Kepala Daerah tingkat II di : Banda Atjeh, Kab. Atjeh Besar (Atjeh); Langsa, Kab. Atjeh Timur (Atjeh); Kab. Bontoli (Sumatra Utara); Medan, Kab. Deli Serdang (Sumatra Utara); Sukittinggi, Kab. Agam (Sum. Bar.); Pariaman, Kab. Padang-Lorieta (Sumatra Barat); Rengat, Kab. Indragiri (Riau); Bindjai, Kab. Langkat (Sumatra-Utara); Djambi, Kab. Ketanggahari (Djambi); Palentan; Derak, (Djawa Tengah); Bandjarnegara (Djawa Tengah); Purwokerto, (Djawa Tengah); Djombang (Djawa Timur); Djember (Djawa Timur); Kenjuwangi (Djawa Timur); Ngawi (Djawa Timur); Sloman (Jogjakarta); Kab. Djakarta Utara (Djakarta); Kab. Djakarta-Tengah (Djakarta); Kab. Djakarta Selatan (Djakarta); Bandung (Djabar); Tasikmalaja (Djawa Barat); Garut (Djawa Barat); Purwokerto (Djabar); Sukabumi (Djawa Barat); Rangkas-Litung, Kab. Lebak (Djawa Barat); Pati (Djawa Tengah); Purbolinggo (Djawa Tengah); Tuban (Djawa Timur); Pabonan, Kab. Pabonan (Bali); Denpasar, Kab. Badung (Bali); Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan (Kal. Selatan); Musrotahe, Kab. Barito Selatan (Kalimantan Tengah); Penggarong, Kab. Kutai (Kalimantan Timur); Amuntai, Kab. Hulu Sungai Utara (Kal. Selatan); Djenebonto, Kab. Djenebonto (Sulawesi Selatan); Senjaja, Kab. Senja (Sulawesi Selatan); Pinrang, Kab. Pinrang (Sulawesi Selatan); Klu-Bau, Kab. Kutai (Sulawesi Tenggara); Gorontalo, Kab. Gorontalo (Sulawesi Utara); Takana, Kab. Sangir Wolad (Sulawesi Utara); Manado, Kab. Linaheau (Sulawesi Utara); Raso, Kab. Raso (Sulawesi Tengah); Sumbawa Besar, Kab. Sumbawa (Nusa Tenggara-Barat); Sernate, Kab. Maluku-Utara (Maluku); Ambon, Kab. Maluku Tengah (Maluku).
13. Djawatan P.U. dan P. Daerah tingkat I di : Banda Atjeh (Atjeh); Medan; Padang; Pekanbaru (Riau); Djambi; Palembang; Djakarta; Bandung; Semarang; Surabaya; Jogjakarta; Bandjarmasin (Kalimantan Selatan); Palangkaraya (Kalimantan Tengah); Samarinda (Kalimantan Timur); Singaperbangsa (Bali); Denpasar (Bali); Kotaraja (Nusa Tenggara Barat); Ambon (Maluku); Makasar; Kendari (Sulawesi Tenggara); Manado; Palu (Sulawesi Tengah);
14. Djawatan P.U. dan P. Daerah tingkat II di : Banda Atjeh, Kab. Atjeh Besar (Atjeh); Langsa, Kab. Atjeh Timur (Atjeh); Kabupaten Bontoli (Sumatera Utara); Medan, Kab. Deli Serdang (Sumatera Utara); Sukittinggi, Kab. Agam (Sumatera Barat); Pariaman, Kab. Padang Pariaman (Sumatera Barat); Rengat, Kab. Indragiri (Riau); Bindjai, Kab. Langkat (Sumatera Utara); Djambi, Kab. Ketanggahari (Djambi); Derak (Djawa Tengah); Bandjarnegara (Djawa Tengah); Purwokerto (Djawa Tengah); Djombang (Djawa Timur); Djember (Djawa Timur); Kenjuwangi (Djawa-Timur); Ngawi (Djawa Timur); Sloman (Jogjakarta); Kabupaten Djakarta Utara (Djakarta); Kabupaten Djakarta Tengah (Djakarta); Kabupaten Djakarta Selatan (Djakarta); Bandung (Djawa Barat); Tasikmalaja (Djawa Barat); Garut (Djawa Barat); Purwokerto (Djawa Barat); Sukabumi (Djawa Barat); Rangkas-Litung, Kab. Lebak (Djawa Barat); Pati (Djawa Tengah); Purbolinggo (Djawa Tengah); Tuban (Djawa Timur);

- Tobanan, Kab. Tobanan (Bali); Denpasar, Kab. Badung (Bali); Kerdang, Kab. Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan); Wengay, Kab. Kutai (Kalimantan Timur); Anuntai, Kab. Hulu Sungai Utara (Kalimantan Selatan); Djenepono, Kab. Djenepono (Sulawesi Selatan); Sengkang, Kab. Wajo (Sulawesi Selatan); Pinrang, Kab. Pinrang (Sulawesi Selatan); Luwu, Kab. Luwu (Sulawesi Tenggara); Gorontalo, Kab. Gorontalo (Sulawesi Utara); Tana, Kab. Sangir Talaud (Sulawesi Utara); Manado, Kab. Minahasa (Sulawesi Utara); Poso, Kab. Poso (Sulawesi Tengah); Sumbawa Besar, Kab. Sumbawa (Nusa Tenggara Barat); Ternate, Kab. Maluku Utara (Maluku); Ambon, Kab. Maluku Tengah (Maluku).
15. Perwakilan Dept. P. & K. daerah tingkat I di: Bandung (Atjeh); Medan; Padang; Pekanbaru (Riau); Djambi; Palembang; Djakarta; Bandung; Semarang; Surabaya; Jogjakarta; Mandjarsari (Kalimantan Selatan); Balikpapan (Kalimantan Tengah); Samarinda (Kalimantan Timur); Singaradja (Bali); Interam (Nusa Tenggara Barat); Ambon (Maluku); Makassar; Kendari (Sulawesi Tenggara); Manado; Teluklawa (Sulawesi Tengah);
/ Denpasar (Bali):
16. Kepala/Pemimpin:
- S.M.P. Negara di Muara Sabak, Kab. Datanghari, Djambi.
 - S.M.P. Negara I di Bindjai, Kab. Langkat, Sumatera Utara.
 - S.M.P. Negara III di Bindjai, Kab. Langkat, Sumatera Utara.
 - S.M.P. Negara I di Djambi.
 - S.M.P. Negara IV di Djambi.
 - S.M.P. Negara II di Palembang.
 - S.M.P. Negara VIII di Palembang.
 - S.M.P. Negara II di Djakarta.
 - S.M.P. Negara XXIX di Djakarta.
 - S.M.P. Negara XVI di Djakarta.
 - S.M.P. Negara XL di Djakarta.
 - S.M.P. Negara XLII di Djakarta.
 - S.M.P. Negara VIII di Djakarta.
 - S.M.P. Negara III di Djakarta.
 - S.M.P. Negara XII di Djakarta.
 - S.M.P. Negara XLIII di Djakarta.
 - S.M.P. Negara I di Tjirachi, Kab. Bandung, Jawa Barat.
 - S.M.P. Negara di Tjikalong, Kab. Bandung, Jawa Barat.
 - S.M.P. Negara I di Tasikmalaja, Jawa Barat.
 - S.M.P. Negara di Singaperbangsa, Kab. Tasikmalaja, Jawa Barat.
 - S.M.P. Negara I di Garut, Jawa Barat.
 - S.M.P. Negara di Tjirahjeng, Kab. Garut, Jawa Barat.
 - S.M.P. Negara II di Sukarejo, Kab. Sukarejo, Jawa Barat.
 - S.M.P. Negara di Kaliatjati, Kab. Sukarejo, Jawa Barat.
 - S.M.P. Negara di Sukaluri, Jawa Barat.
 - S.M.P. Negara di Tjikotok, Kab. Labak, Jawa Barat.
 - S.M.P. Negara I di Roti, Jawa Tengah.
 - S.M.P. Negara III di Pati, Jawa Tengah.
 - S.M.P. Negara I di Purbolinggo, Jawa Tengah.
 - S.M.P. Negara II di Purbolinggo, Jawa Tengah.
 - S.M.P. Negara di Tuban, Jawa Timur.
 - S.M.P. Negara di Rengas, Kab. Tuban, di Jawa Timur.
 - S.M.P. Negara I di Anuntai, Kab. Mulusungai Utara, Kal. Selatan.
 - S.M.P. Negara II di Anuntai, Kab. Mulusungai Utara, Kal. Selatan.
 - S.M.P. Negara di Djenepono, Kab. Djenepono, Sulawesi Selatan.
 - S.M.P. Negara di Allu, Kab. Djenepono, Sulawesi Selatan.
 - S.M.P. Negara di Sengkang, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan.
 - S.M.P. Negara di Sengkang, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan.
 - S.M.P. Negara di Pinrang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan.
 - S.M.P. Negara di Luwu, Kab. Luwu, Sulawesi Tenggara.
 - S.M.P. Negara di Luwu, Kab. Luwu, Sulawesi Tenggara.
 - S.M.P. Negara di Gorontalo, Kab. Gorontalo, Sulawesi Utara.
 - S.M.P. Negara di Tapa, Kab. Gorontalo, Sulawesi Utara.
 - S.M.P. Negara di Ulu-Bicu, Kab. Sangir Talaud, Sulawesi Utara.
 - S.M.P. Negara di Sumbawa Besar, Kab. Sumbawa, Sulawesi Tengah.
 - S.M.P. Negara di Poso, Kab. Poso, Sulawesi Tengah.
 - S.M.P. Negara di Ulu-Bicu, Kab. Sangir Talaud, Sulawesi Utara.
 - S.M.P. Negara I di Sumbawa Besar, Kab. Sumbawa, Sulawesi Tengah.
 - S.M.P. Negara di Sumbawa Besar, Kab. Sumbawa, Sulawesi Tengah.
 - S.M.P. Negara IV di Sumbawa Besar, Kab. Sumbawa, Sulawesi Tengah.
 - S.M.P. Negara di Sumbawa Besar, Kab. Sumbawa, Sulawesi Tengah.

- 3 -
- S.M.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara

S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara
S.H.P. Negara

17. Departemen Agama, D.I. Soerabaja, Djakarta (5 expl).
18. Departemen Olah Raga, D.I. Jenderal Sudirman, Jakarta (5 expl).
19. Departemen P.D dan K. D.I. Tjilidjan No.4 Jakarta :
 c. Pembantu Khusus Menteri Pendidikan Besar dan Kebudayaan
 d. Biro Urusan Pemuda
 e. Biro Publikistik, Statistik dan Dokumentasi:
 1. Seksi Statistik (3 expl)
 2. Seksi Dokumentasi (3 expl)
 3. Seksi Publisasi (untuk Disiplin)
 f. Biro Hukum dan Perundang-undangan (10 expl)
 g. Biro Pengawasan Keuangan
 h. Biro Keuangan (16 expl)
 i. Biro Administrasi Pegawai C-I (5 expl)
 j. Biro Urusan Sokongan
 k. Biro Kesejahteraan Pegawai
 l. Biro Urusan Belanja dan Barjawan
 m. Biro Perbaikan
 n. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Pendidikan
 o. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Personalia dan Organisasi
 p. Sekretaris Pembantu Menteri Bidang Material dan Keuangan
20. Lembaga Penyelidikan dan Penelitian (3 expl) →
21. Direktorat Pendidikan Pedjuruan (3 expl)
22. Direktorat Pendidikan Teknik (3 expl)
23. Direktorat Pendidikan Guru/Tenaga (3 expl)
24. Direktorat Pendidikan Umum:
 a. semua Inspektorat
 b. semua Urusan dari Inspektariat Tata-lokaene.
 (untuk urusan hubungan antar-jarak, Terpusatkan dan Dokumenasi
 5 expl).
25. A r s i p .

Lampiran I : Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
tanggal 30 Juli 1964 No.80/S.K./I/III

TENTANG : Pembukaan S.H.P.Negara tahun pelajaran
1964 / 1965.-

No. Urut	Nama dan tempat Se- kolah yang dibuka	Djumlah kelas	Keterangan
1.	S.H.P.Negara di Muara Sabak, Kabupaten Betang- hari, Daerah tingkat I Djenbi.	3 buah kelas I,	Dipelenggarakan pada waktu pagi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
 Republik Indonesia

Atas nama Menteri:

Kepala Direktorat Pendidikan Umum

Atas nama Beliau :

Kepala Inspektorat Tata-Laksana,



(M. SIREH).-

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
tanggal 30 Juli 1964 No. 80/S."/B/III.-
TENTANG : Pemotakan S.M.P. Negara tahun pelajaran
1964/1965.-

No. Urut	Nama dan tempat Sekolah yang dipotjak	Dipotjak menjadi	Jumlah kelas	Keterangan
1.	S.M.P. Negara I di Bindjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.	a. S.M.P. Negara I di Bindjai. b. S.M.P. Negara III di Bindjai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.	2 buah kelas I 7 " " II 3 " " III	Disolengga- rakan pada waktu pagi
2.	S.M.P. Negara I di Djarbi.	a. S.M.P. Negara I di Djarbi. b. S.M.P. Negara IV di Djarbi.	2 buah kelas I 1 " " II	Disolengga- rakan pada waktu pagi
3.	S.M.P. Negara II di Palembang	a. S.M.P. Negara II di Palembang. b. S.M.P. Negara VIII di Palembang.	3 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Disolengga- rakan pada waktu sore
4.	S.M.P. Negara II di Djakarta.	a. S.M.P. Negara II di Djakarta. b. S.M.P. Negara XXXIX di Djakarta.	3 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	Disolengga- rakan pada waktu sore
5.	S.M.P. Negara XVI di Djakarta	a. S.M.P. Negara XVI di Djakarta. b. S.M.P. Negara XL di Djakarta c. S.M.P. Negara XLII di Djakarta.	3 buah kelas I 3 " " II 2 " " III 3 buah kelas I 4 " " II 2 " " III	/ pagi dan Disolengga- rakan pada waktu/sore Disolengga- rakan pada waktu pagi dan sore.
6.	S.M.P. Negara VIII di Djakarta.	a. S.M.P. Negara VIII di Djakarta. b. S.M.P. Negara XLI di Djakarta	5 buah kelas I 2 " " II 1 " " III	Disolengga- rakan pada waktu pagi dan sore.
7.	S.M.P. Negara XII di Djakarta.	a. S.M.P. Negara XII di Djakarta. b. S.M.P. Negara XLIII di Djakarta	3 buah kelas I 3 " " II 3 " " III	Disolengga- rakan pada waktu sore.
8.	S.M.P. Negara I di Tjirahi, Kabupaten Bandung, Djawa Barat.	a. S.M.P. Negara I di Tjirahi. b. S.M.P. Negara di Tjikalong- Wetan, Kabupaten Bandung, Djawa Barat.	3 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Disolengga- rakan pada waktu pagi

9. S.M.P. Negara

No. Urut.	Nama dan tempat Sekolah yang dinetjah	Dinetjah mondjadi	Djumlah kelas	Keterangan
9.	S.M.P. Negara I di Tasikmalaja, Djawa Barat.	a. S.M.P. Negara I di Tasikmalaja. b. S.M.P. Negara di Singaperbangsa, Kab. Tasikmalaja, Djawa Barat	3 buah kelas I 3 " " II 3 " " III	Disolenggara- rakan pada waktu pagi
10.	S.M.P. Negara I di Garut, Djawa Barat.	a. S.M.P. Negara I di Garut. b. S.M.P. Negara di Tilkadjang Kab. Garut, Djawa Barat.	3 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Disolenggara- rakan pada waktu pagi
11.	S.M.P. Negara II di Subang, Kabupaten Purwakarta, Djawa Barat.	a. S.M.P. Negara II di Subang. b. S.M.P. Negara di Kalidjati, Kab. Purwakarta, Djawa Barat	3 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	Disolenggara- rakan pada waktu pagi
12.	S.M.P. Negara di Sukabumi, Djawa Barat.	a. S.M.P. Negara di Sukabumi. b. S.M.P. Negara di Tjikotok, Kab. Lembang, Djawa Barat.	2 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Disolenggara- rakan pada waktu pagi
13.	S.M.P. Negara I di Pati, Djawa Tengah	a. S.M.P. Negara I di Pati. b. S.M.P. Negara III di Pati, Djawa Tengah.	2 buah kelas I 2 " " II	Disolenggara- rakan pada waktu pagi.
14.	S.M.P. Negara di Purbolingo, Djawa Tengah	a. S.M.P. Negara I di Purbolingo. b. S.M.P. Negara II di Purbolingo, Djawa Tengah.	3 buah kelas I 3 " " II 4 " " III	Disolenggara- rakan pada waktu pagi
15.	S.M.P. Negara di Tuban, Djawa Timur.	a. S.M.P. Negara di Tuban. b. S.M.P. Negara di Rengel, Kabupaten Tuban, Djawa Timur.	3 buah kelas I 2 " " II 1 " " III	Disolenggara- rakan pada waktu pagi
16.	S.M.P. Negara di Aruntai, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.	a. S.M.P. Negara I di Aruntai. b. S.M.P. Negara II di Aruntai Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.	2 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	Disolenggara- rakan pada waktu pagi
17.	S.M.P. Negara di Djeneponto, Kabupaten Djeneponto, Sulawesi Selatan	a. S.M.P. Negara di Djeneponto. b. S.M.P. Negara di Allu, Kab. Djeneponto, Sulawesi Selatan	3 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	Disolenggara- rakan pada waktu pagi
18.	S.M.P. Negara di Songkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.	a. S.M.P. Negara di Songkang. b. S.M.P. Negara di Torro, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.	3 buah kelas I 3 " " II 3 " " III	Disolenggara- rakan pada waktu pagi

No. Urut	Nama dan tempat Sekolah yang diteliti	Dipet (ah rend) jadi	Ditambah kelas	Keterangan
19.	S.M.P. Negara di Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.	a. S.M.P. Negara di Pinrang. b. S.M.P. Negara di Lingsa, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan.	3 buah kelas I 3 " " II 3 " " III	Disolengga rakan pada waktu pagi
20.	S.M.P. Negara di Bau-Bau, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.	a. S.M.P. Negara di Bau-Bau. b. S.M.P. Negara di Kaloana, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara.	3 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	Disolengga rakan pada waktu pagi
21.	S.M.P. Negara I di Gorontalo, Sulawesi Utara	a. S.M.P. Negara I di Gorontalo b. S.M.P. Negara di Tara, Kab. Gorontalo, Sulawesi Utara	3 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	Disolengga rakan pada waktu pagi
22.	S.M.P. Negara di Ulu-Siau, Kabupaten Sangir Talaud Sulawesi Utara.	a. S.M.P. Negara di Ulu Siau. b. S.M.P. Negara di Gondong Siau Kab. Sangir Talaud, Sulawesi Utara.	4 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	Disolengga rakan pada waktu pagi
23.	S.M.P. Negara di Ampana, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Tengah.	a. S.M.P. Negara di Ampana. b. S.M.P. Negara di Una-Una, Kab. Pesisir, Sulawesi Tengah.	2 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Disolengga rakan pada waktu pagi
24.	S.M.P. Negara I di Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.	a. S.M.P. Negara I di Tondano. b. S.M.P. Negara di Tandongan Kab. Minahasa Sulawesi Utara.	3 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Disolengga rakan pada waktu pagi

Montori Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Atas nama Montori:
Kendala Direktorat Pendidikan Umum
Kendala Atas nama Beliau :
Kendala Direktorat Tata - Laksana.



LAMPIRAN III : Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
tanggal 30 Djuli 1964 No.80/S.K/W/III
TENTANG : Penegerian S.M.P. Swasta tahun peladjaran
1964/1965. -

No. Urut.	Nama dan tempat Sekolah yang dinegerikan	Djumlah kelas	Keterangan
1.	Bekas S.M.P. P.P.S. di Banda-Atjeh, Kabupaten Atjeh Besar, Atjeh.	3 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negeri IV di Banda-Atjeh. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
2.	S.M.P. di Peureulak, Kabupaten Atjeh-Timur, Atjeh.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Peureulak. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
3.	S.M.P. Swasta di Tigalingga, Kabupaten Dairi Sumatera Utara.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tigalingga b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
4.	S.M.P. Persiapan Negeri di Sunggal, Kabupaten Deli-Serdang, Sumatera Utara.	3 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Sunggal. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
5.	S.M.P. Swasta Tandjung Mutiara Tikur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.	2 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tikur. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
6.	S.M.P. Jajasan Pendidikan dan Beasiswa V Koto di Kampung Dalam, Kabupaten Padang-Lariaman, Sumatera Barat.	2 buah kelas I 2 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Kampung Dalam. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
7.	S.M.P. Harapan di Tjerenti, Kabupaten Indragiri, Riau.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tjerenti. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
8.	S.M.P. Persiapan di Grogol, Kabupaten Demak, Djawa Tengah.	3 buah kelas I	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Grogol. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
9.	S.M.P. Usaha Rosjarekro di Wonodadi, Kabupaten Bondjonegara, Djawa Tengah.	4 buah kelas I 1 " " II	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Wonodadi. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
10.	S.M.P. di Kalimoneh, Kabupaten Banjumas, Djawa Tengah.	4 buah kelas I 4 " " II	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Kalimoneh. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
11.	S.M.P. di Modjogung, Kabupaten Djombang, Djawa Timur.	4 buah kelas I 4 " " II	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Modjogung. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.

No. Urut.	Nama dan tempat Sekolah yang dinuggerikon	Djumlah kelas	Keterangan
12.	S.M.P. di Kalisat, Kabupaten Djember, Djawa Timur.	3 buah kelas I 2 " " II	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Kalisat. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
13.	S.M.P. Bohagio di Kalibaru, Kabupaten Bojowangi, Djawa Timur.	2 buah kelas I 2 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Kalibaru. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
14.	S.M.P. Bantuan Negera di Walikukun, Kabupaten Ngawi, Djawa Timur.	5 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Walikukun. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
15.	S.M.P. Persiapan di Godean, Kabupaten Sleman, Jogjakarta.	4 buah kelas I 2 " " II	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Godean. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
16.	S.M.P. Swasta di Simpur, Kandungan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.	2 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Simpur Kandungan. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
17.	S.M.P. Karya Bantuan di Mengkatip, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Mengkatip. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
18.	S.M.P. Gotong Rojong di Muara Muntai, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Muara Muntai. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
18.	S.M.P. Gotong Rojong di Muara Muntai, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Muara Muntai. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
19.	S.M.P. Gotong Rojong di Kotabangun, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Kotabangun. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
20.	S.M.P. Gotong Rojong di Badjara, Kabupaten Tabanan, Bali.	3 buah kelas I 2 " " II	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Badjara. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
21.	S.M.P. Wancayasa di Dlahkiuh, Kabupaten Badung, Bali.	2 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Dlahkiuh. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
22.	S.M.P. 17 Agustus di Empang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Empang. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
23.	S.M.P. Kartini di Kajoa, Kabupaten Maluku-Utara, Maluku.	2 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Kajoa. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.
24.	S.M.P. Swasta di Kairatu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.	2 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	a. Mendjadi S.M.P. Negero di Kairatu. b. Diselenggarakan pada waktu pagi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri:

Kepala Direktorat Pendidikan Umum

Atas nama Beliau :

Inspektur Tata - Laksana,

(J. Dairan) .-

